



## Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Benowo Kota Surabaya

Eriek Rahmat Kuncoro <sup>1\*</sup>, Shobirin Noer <sup>2</sup>, Hudallah Hudallah <sup>3</sup>,

<sup>1-3</sup>Universitas Darul Ulum, Indonesia

Alamat: Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419

Korespondensi penulis: [bintinasikhatulummatin@gmail.com](mailto:bintinasikhatulummatin@gmail.com)\*

**Abstract.** Elections serve as a crucial pillar of democracy, allowing citizens to participate in the selection of leaders and shaping national policies. In Indonesia, the General Election Commission (KPU) is responsible for organizing elections, ensuring that the process is transparent, fair, and accountable. Understanding public perceptions of the KPU's performance is vital for evaluating the success and legitimacy of the democratic process, particularly in regions like Benowo District, Surabaya, which reflects the broader dynamics of local democracy. This study employs a qualitative methodology to explore and interpret the views and experiences of the public regarding the KPU's performance in the 2024 Election. Data were gathered through in-depth interviews with community leaders and direct observation of the election process. The qualitative approach allows for a comprehensive analysis of the complex and nuanced perceptions held by the community. The findings reveal that the public in Benowo District generally holds a positive perception of the KPU's performance, appreciating the orderliness, transparency, and efficiency of the electoral process. However, challenges such as logistics management were identified, indicating areas where the KPU can improve in future elections. These insights are crucial for enhancing the quality of electoral administration and strengthening the democratic process in Indonesia.

**Keywords:** Public perception, KPU performance, 2024 Election

**Abstrak.** Pemilihan umum merupakan pilar penting demokrasi, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan nasional. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu dengan memastikan prosesnya berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Memahami persepsi masyarakat terhadap kinerja KPU sangat penting untuk menilai keberhasilan dan legitimasi proses demokrasi, terutama di wilayah seperti Kecamatan Benowo, Surabaya, yang mencerminkan dinamika demokrasi lokal yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan pandangan serta pengalaman masyarakat terkait kinerja KPU dalam Pemilu 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan observasi langsung selama proses pemilu berlangsung. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap persepsi masyarakat yang kompleks dan bernuansa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Benowo umumnya memiliki persepsi positif terhadap kinerja KPU, dengan mengapresiasi keteraturan, transparansi, dan efisiensi proses pemilu. Namun, tantangan seperti manajemen logistik juga teridentifikasi, menunjukkan area yang perlu ditingkatkan oleh KPU dalam pemilu mendatang. Temuan ini penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci :** Persepsi masyarakat, Kinerja KPU, Pemilu 2024

### 1. LATAR BELAKANG

Latar belakang politik sebagai panglima dalam kehidupan bernegara sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama dalam demokrasi, di mana partai politik menjadi instrumen untuk mewakili kedaulatan rakyat. Pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk menentukan

pemimpin di tingkat eksekutif dan legislatif, tetapi juga sebagai indikator keberlanjutan demokrasi. Pemilu yang bebas, adil, dan berkala sangat penting untuk menciptakan legitimasi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan transparan, akuntabel, dan adil. Namun, berbagai tantangan seringkali muncul dalam pelaksanaan Pemilu, seperti yang terjadi di Pemilu 2024, khususnya di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan informasi yang sampai kepada masyarakat, yang berdampak pada partisipasi pemilih. Keluhan terkait kurangnya akses informasi menggerakkan KPU Kecamatan Benowo untuk mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, salah satunya melalui pembentukan grup WhatsApp. Inisiatif ini diharapkan dapat memperbaiki aliran informasi dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu.

Studi ini berupaya untuk mengkaji persepsi masyarakat Kecamatan Benowo terhadap kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan akses informasi dan transparansi dalam proses Pemilu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kinerja KPU dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara inklusif dan efektif di tingkat lokal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian ini berfokus pada teori-teori yang mendasari pentingnya demokrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), serta peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil. Salah satu indikator penting dari demokrasi yang berkualitas adalah akuntabilitas dari lembaga penyelenggara Pemilu, seperti yang dikemukakan oleh Supriyanto (2007), bahwa ketika akuntabilitas penyelenggara Pemilu rusak, maka kualitas demokrasi juga turut terdegradasi. Freedom House juga menegaskan bahwa salah satu dari empat indeks pokok demokrasi adalah sistem Pemilu yang jujur dan adil, serta perlindungan hak-hak sipil dan politik.

Pemilu merupakan mekanisme utama dalam mewujudkan demokrasi, di mana melalui proses ini, rakyat dapat menyegarkan komitmen dan moralitas dalam memilih pemimpin secara demokratis (Alpikri & Lestari, 2017). KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Ardyanti Ahmad dkk). Peranan KPU dalam menjalankan tugasnya sangat

menentukan partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Yuda Sagita (2022) terkait Pilkada Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan kinerja KPU yang efektif.

Lebih lanjut, KPU harus beroperasi secara independen, proporsional, profesional, demokratis, dan akuntabel agar tujuan nasional dalam menciptakan pemerintahan yang sah dan representatif dapat terwujud. Noviyati (2021) menyebutkan pentingnya peran KPU dalam Pemilu di Kabupaten Bone menuju Pemilu 2024, yang menekankan bahwa kesuksesan Pemilu tidak terlepas dari profesionalisme dan integritas lembaga ini. KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), sebagai perpanjangan tangan KPU di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan Pemilu berjalan secara adil dan transparan di semua tahapan, dari perencanaan hingga pelaksanaan (Alfario Grevent Binsasi, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu memberikan landasan bagi penelitian ini dengan menunjukkan bahwa peran KPU dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kinerja KPU dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Benowo, Surabaya, dan bagaimana penggunaan teknologi, seperti WhatsApp, dapat mempengaruhi akses informasi dan partisipasi politik masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi secara akurat dan valid, baik data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari masyarakat, petugas penyelenggara Pemilu, serta anggota partai politik di Kabupaten Jombang. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada persepsi mereka mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024.

Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menangkap fenomena yang muncul di masyarakat terkait kinerja KPU. Peneliti secara langsung mengamati berbagai aspek di lapangan, termasuk dinamika hubungan antara masyarakat dan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Observasi ini memberikan data yang lebih kaya mengenai persepsi masyarakat.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, laporan ilmiah, dan dokumen resmi terkait KPU dan Pemilu. Data sekunder ini membantu memperkuat analisis dan memberikan informasi tambahan yang mendukung penelitian.

Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, penelitian ini mampu menggali informasi yang mendalam dan menyeluruh terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja KPU di Kabupaten Jombang, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dengan tujuan mengkaji persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pengamatan langsung selama proses Pemilu, serta penelaahan dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan dan pengalaman masyarakat terkait transparansi, keteraturan, dan efisiensi kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

Proses pengumpulan data berlangsung beberapa bulan menjelang hingga selama Pemilu 2024, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Benowo yang dianggap relevan karena keragaman sosial-politik dan demografinya. Wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat, seperti ketua LPMK dan pemimpin agama, serta warga umum memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilu. Observasi langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengumpulan dokumen dari media sosial, media cetak, serta regulasi terkait juga memberikan data yang memperkuat temuan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Benowo secara umum memiliki pandangan yang positif terhadap kinerja KPU dalam Pemilu 2024. Responden memberikan apresiasi terhadap keteraturan dan transparansi yang ditunjukkan oleh KPU dalam setiap tahap Pemilu. Mereka menilai bahwa KPU telah melakukan sosialisasi yang cukup baik kepada masyarakat, terutama terkait proses dan tahapan Pemilu. Transparansi dalam penyampaian informasi juga diakui berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Meskipun demikian, masyarakat juga mengungkapkan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi KPU kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, beberapa responden menyoroti masalah logistik di TPS yang, meskipun tidak signifikan, masih menjadi kendala yang sebaiknya diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Benowo dinilai berhasil dalam menjaga keteraturan dan transparansi. Pandangan ini mencerminkan kesesuaian dengan teori partisipasi publik dalam demokrasi, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi publik yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat transparansi penyelenggaraan Pemilu.

Namun, ada catatan penting dari masyarakat yang menyarankan agar KPU meningkatkan koordinasi dalam hal distribusi logistik serta responsivitas terhadap masukan masyarakat. Meskipun masalah logistik di TPS dinilai sebagai kendala kecil, perbaikan dalam aspek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Pemilu secara keseluruhan. Efektivitas komunikasi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi terkait Pemilu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh keterbukaan dan transparansi institusi penyelenggara Pemilu. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi KPU untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Pemilu, khususnya dalam aspek logistik dan komunikasi. Upaya perbaikan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kecamatan Benowo dan di daerah lainnya.

Dengan demikian, meskipun kinerja KPU dalam Pemilu 2024 dinilai positif, evaluasi yang mendalam dan perbaikan yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses Pemilu di masa depan berjalan lebih efisien, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap institusi demokrasi dalam rangka memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja KPU, Sebagian besar masyarakat Kecamatan Benowo menilai kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah cukup baik, terutama dalam hal transparansi dan ketertiban proses pemilu. Masyarakat mengapresiasi upaya KPU dalam menjaga netralitas dan transparansi selama proses pemilu berlangsung. Namun, ada

beberapa kritik terkait efisiensi, terutama dalam hal waktu penghitungan suara dan distribusi logistik yang dinilai masih kurang optimal.

Sumber Informasi dan Pandangan terhadap Kualitas Informasi Masyarakat Kecamatan Benowo umumnya memperoleh informasi tentang kinerja KPU dari berbagai sumber, seperti media sosial, berita televisi, dan komunikasi antar warga. Meskipun demikian, ada keraguan mengenai keakuratan dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari media sosial dibandingkan dengan media resmi. Informasi yang berasal dari sumber resmi, seperti siaran pers KPU dan berita televisi, dianggap lebih kredibel dan dapat diandalkan.

Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Tugas dan Fungsi KPU, Tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Benowo mengenai tugas dan fungsi KPU bervariasi. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pemahaman yang baik ini berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kinerja KPU. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami peran spesifik KPU, yang menyebabkan pandangan negatif atau ketidakpuasan terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan pemilu.

Secara keseluruhan, masyarakat Kecamatan Benowo menunjukkan apresiasi terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 meskipun ada beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan. Tingkat kepuasan masyarakat juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap fungsi dan tugas KPU, serta kualitas informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, disarankan agar KPU terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya, serta meningkatkan upaya sosialisasi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang peran KPU.

## **Saran**

Adapun saran penelitian ini terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja komisi pemilihan umum dalam pemilu 2024 di kecamatan benowo yakni :

### **Perbaikan Manajemen Logistik:**

KPU perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem manajemen logistiknya. Langkah konkret termasuk perencanaan distribusi yang lebih efisien, pemantauan secara teratur terhadap kebutuhan logistik setiap TPS, dan persiapan yang matang dalam mengatasi potensi kendala logistik.

### **Pengembangan Strategi Komunikasi:**

Penggunaan media sosial, ceramah, dan program edukasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses pemilu. KPU harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan mencakup semua tahapan pemilu dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

### **Evaluasi Responsivitas dan Konsultasi:**

KPU harus meningkatkan mekanisme responsivitas terhadap masukan dari partai politik, tokoh masyarakat, dan warga. Evaluasi terhadap masukan ini secara berkala akan membantu KPU dalam menyesuaikan dan memperbaiki proses pemilu sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang ada di lapangan.

### **Penguatan Pendekatan Lokal:**

Integrasi nilai-nilai lokal dalam proses pemilihan akan memperkaya partisipasi demokrasi dan membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap KPU. Upaya untuk lebih mengakomodasi aspek keagamaan, budaya, dan sosial dalam setiap tahapan pemilu akan memperkuat legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan KPU dapat mempertahankan standar tinggi dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan efisien di Kecamatan Benowo. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasional, komunikasi, serta respons terhadap masukan masyarakat akan menjadi kunci untuk memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, & Sara Staino. (2006). *Electoral management design: The International IDEA handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Annan, K. A., et al. (2012). *Deepening democracy: A strategy for improving the integrity of elections worldwide*. Sweden: International IDEA - The Global Commission on Elections, Democracy, and Security.
- Ardyanti, A., et al. (2020). *Kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung*.
- Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiman, A. (2002). *Teori negara: Negara, kekuasaan, dan ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fogg, K. (2002). *International electoral standards: Guidelines for reviewing the legal framework of elections*. Sweden: Bulls Tryckeri.
- Garner, B. A. (1999). *Black's law dictionary (7th ed.)*. St. Paul, MN: West Publishing.
- Hertanto. (2017). *Partisipasi pemilih: Tantangan pemilu dan pilgub*. Diambil dari Lampost.co: <https://www.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-tantangan-pemilu-dan-pilgub.html>
- Kusnardi, M., & Ibrahim. (1983). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-UI.
- Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). *Public relations: Profesi dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lidwina, A. (2020). *Partisipasi pemilih dalam pilpres & pilkada*. Diambil dari Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>
- Macridis, R. C., & Brown, B. E. (1986). *Perbandingan politik*. Jakarta: Erlangga. (Terjemahan A. R. Henry Sitanggang dari *Comparative politics: Notes and readings*. New York: The Dorsey Press).
- Maisel, L. S., & Buckley, K. Z. (2005). *Parties and elections in America: The electoral process (4th ed.)*. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Meyer, T. (2005). *Social and libertarian democracy: Competing models to fill the frame of liberal democracy*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Noviyati, N. (2021). *Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih*.
- Orozco-Henriques, J. (2010). *Electoral justice: The International IDEA handbook*. Sweden: International IDEA.
- Sagita, Y. (2022). *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang*.
- Schumpeter, J. (1976). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Harper and Row.
- Snyder, J. (2003). *Dari pemungutan suara ke arah perubahan darah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Supriyanto, D., & Pratama, H. M. (2020). *Pengantar aktor pemilu*. Dalam Kelas virtual Perludem. Jakarta. Diambil dari <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-2.01-Pengantar-Aktor-Pemilu.pdf>

Wulandari, M. C. (2018). Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Universitas Brawijaya). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162264/>

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>